

KETAHANAN NASIONAL DALAM PENDEKATAN MULTIKULTURALISME

Oleh:

Iriyanto Widisuseno

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Multiculturalism is a tool, and method, vehicle or the equivalent notion of ideology, function to enhance human dignity and self resilience. Since multiculturalism is a tool then the sense of culture or ideology embodied in the term multiculturalism should be viewed from the perspective of function for human life. Multiculturalism has always built based on the philosophical outlook of a nation on the meaning of life and life, and relationships with environment as well as the creator. Then every nation in giving practical meaning of multiculturalism will be colored by its philosophical outlook. The multicultural education paradigm led to the creation of attitudes of learners who want to appreciate, respect for ethnic, religious and cultural society. Then, too, multicultural education to give awareness to students that differences in ethnicity, religion and culture as well as the other does not become a barrier for students to unite and cooperate. Thus, Pancasila as an ideology of education is needed, especially considering the posture of Indonesia in the form of an archipelago, and pluralistic world is at a cross position.

Key words: *self resilience, multiculturalism, multicultural education.*

A. PENDAHULUAN

Ketahanan nasional hakikatnya adalah kondisi suatu bangsa yang menggambarkan kemampuan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dan tantangan. Faktor penguat ketahanan nasional suatu bangsa yaitu ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Sosial budaya sebagai salah satu faktor penguat ketahanan nasional, maka dalam pembangunannya tidak dapat lepas dari kondisi objektif masyarakat Indonesia yaitu masyarakat yang multikultural. Pendekatan multikulturalisme di Indonesia masih dipandang sebagai pendekatan yang paradoksal, disebabkan ada kesalahan pemahaman. Bahwa di satu sisi menginginkan persatuan tetapi di lain sisi mempertajam perbedaan. Namun kenyataannya wajah masyarakat Indonesia adalah multikultural, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas pondasi

masyarakat yang plural berdimensi multikultural. Jadi, basis ketahanan nasional Indonesia sesungguhnya adalah pluralitas multikulturalisme. Permasalahan yang ingin diangkat dalam makalah ini yaitu : (1) Apa problem ketahanan nasional Indonesia saat ini, (2) apa urgensi pendekatan multikulturalisme dalam ketahanan nasional, dan (3) bagaimana pola pendekatan multikulturalisme dalam mengatasi problem ketahanan nasional Indonesia.

B. PROBLEM KETAHANAN NASIONAL

Jika melihat fenomena yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia saat ini, bangsa dan negara Indonesia sedang mengalami berbagai tantangan atau bahkan ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, gerakan reformasi yang telah digulirkan saat ini justru menyisakan dampaknya yang berkepanjangan. Semangat

demokratisasi yang menjelma dalam reformasi hanya melahirkan nilai-nilai kebebasan yang kering dari spiritualitas nilai moral dan etika, kemudian menjalar menjadi krisis sosio kultural bangsa Indonesia. Krisis budaya yang meluas di kalangan masyarakat itu dapat disaksikan dalam berbagai bentuknya, seperti terjadinya *disorientasi dan distorsi*. Disorientasi artinya masyarakat kehilangan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akibat semakin lepas dari nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman, pengangan, dan pandangan hidup. Distorsi nilai, yaitu pemutarbalikan cara pandang, nilai-nilai lama yang dahulu dijadikan pedoman, dan pandangan hidup sekarang difahami sebagai sesuatu yang kuno dan ketinggalan jaman. Sementara masyarakat lebih memilih dan mempercayai nilai-nilai modern yang serba praktis dan pragmatis, kesemuanya belum tentu sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Masyarakat mengalami kegoyahan dalam pandangan hidupnya, mudah terombang-ambing dan mudah termakan provokasi yang menjerumuskan. Modus distorsi ditandai semakin memudar ikatan kohesivitas sosial, seperti menurunnya rasa solidaritas atau kesetiakawanan sosial sebagai sesama anak bangsa. Kehidupan sosial menjadi hambar dan gersang, kering dari spiritualitas nilai-nilai sosial dan masyarakat menjadi temperamental sehingga mudah melakukan berbagai tindakan kekerasan atau anarkhis (Iriyanto, 2006).

Di sisi lain muncul pada sebagian kaum elit suatu pemikiran yang dilandasi semangat federalisme dan demokrasi liberal, misalnya dalam bentuk ide – ide pemekaran wilayah untuk memperluas daerah-daerah otonomi khusus tanpa alasan rasional yang memihak kepentingan masyarakat. Padahal, ide awal pengembangan otonomi daerah adalah menjadikan daerah sebagai filter bagi gerakan separatisme, mendekatkan rakyat pada pengambil keputusan (*policy maker*) dan menyebarkan serta meratakan pusat-pusat pertumbuhan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya, namun ternyata perkembangannya hanya

membuahkan hasil sampingan (*by product*) berupa raja-raja kecil di dalam negara. Kemudian lagi muncul berbagai gerakan anarkhis dan separatis yang bernuansa sara masih terjadi di mana-mana. Seperti gerakan pembelaan kebenaran dan keadilan dengan mengatasnamakan agama hanya melegalisasi tindak kekerasan dan pemaksaan kehendak kepada kelompok agama, budaya, etnis masyarakat lain.

Ancaman dari luar negeri berupa dampak multi dimensi dari globalisasi, misalnya tekanan kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di segala bidang kehidupan, dapat menggoyahkan bahkan mengancam eksistensi negara kebangsaan. Seperti misalnya semangat liberalisme yang melahirkan anak-anak kandungnya yaitu kapitalisme dan demokrasi liberal saat ini telah mengembangkan sayapnya ke seluruh penjuru dunia. Nilai-nilai liberalisme barat yang dikemas ke dalam sistem ekonomi kapitalis dan sistem demokrasi liberal mampu menciptakan tatanan dunia baru yang bersifat mondial. Ada ketegangan kekuatan tarik ulur antara nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai global.

Gerakan reformasi yang telah digulirkan saat ini justru menimbulkan dampak sampingan. Semangat demokratisasi yang menjelma dalam gerakan reformasi hanya melahirkan nilai-nilai kebebasan yang kering dari spiritualitas nilai moral dan etika, pada akhirnya menjalar menjadi krisis sosio kultural bangsa Indonesia. Krisis budaya yang meluas di kalangan masyarakat itu dapat disaksikan dalam berbagai bentuknya, seperti terjadinya *distorsi dan disorientasi* nilai. Disorientasi artinya masyarakat kehilangan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akibat semakin lepas dari nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman, pengangan, dan pandangan hidup. Distorsi nilai, yaitu pemutarbalikan cara pandang, nilai-nilai lama yang dahulu dijadikan pedoman, dan pandangan hidup sekarang difahami sebagai sesuatu yang kuno dan ketinggalan jaman. Sementara masyarakat lebih memilih dan mempercayai nilai-nilai

modern yang serba praktis dan pragmatis, kesemuanya belum tentu sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Masyarakat mengalami kegoyahan dalam pandangan hidupnya, mudah terombang-ambing dan mudah termakan provokasi yang menjerumuskan. Modus distorsi ditandai oleh semakin menurun rasa solidaritas sosial atau kesetiakawanan sebagai sesama anak bangsa. Hidup menjadi hambar, gersang, dan mudah melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarkhi (Iriyanto, 2006)

Merosotnya penghargaan nilai moral, kesantunan sosial, kepatuhan terhadap hukum, nilai etik berlanjut konflik yang bernuansa politik, etnis dan agama seperti yang terjadi di Aceh, Kalimantan Barat dan Tengah, Maluku Sulawesi Tengah. Meluasnya penyakit sosial yang terjadi pada saat ini di berbagai wilayah Indonesia menandakan betapa rapuhnya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara kebangsaan, betapa kentalnya primordialisme antar kelompok dan betapa rendahnya solidaritas nasional dalam negara kebangsaan yang multikultural.

Kata "Bhineka Tunggal Ika" yang dicetuskan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia memanasifestasikan sebuah realita wajah masyarakat bangsa Indonesia yang multikultural. Di atas realitas masyarakat yang multikultural inilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dibangun dan berdiri tegak hingga sekarang ini. Istilah "kesatuan" dalam NKRI sebagai penjelmaan Bhineka Tunggal Ika tidak sekedar mengandung arti fisik, melainkan psikis dan kultural. Tidak dalam arti agregasi yang atomistik, tidak dalam arti integrasi struktural, tetapi kesatuan yang memiliki derajat tertinggi yaitu integrasi kultural yang mengandung didalamnya solidaritas nasional (*national solidarity*). Ideologi Pancasila memainkan peran sebagai perekat pluralitas budaya.

Berbagai tantangan tersebut di atas jika tidak segera diatasi dalam kumulasinya akan merongrong ketahanan nasional bangsa dan negara Indonesia. Ketahanan nasional harus dibangun di atas akar kebudayaan

bangsa Indonesia sendiri. Masalah ketahanan nasional harus diselesaikan melalui pendekatan kebudayaan. Strategi kebudayaan dalam ketahanan nasional yaitu multikulturalisme Pancasila.

Berbicara tentang Pancasila seharusnya kita mendudukan diri sebagai sesama warga bangsa, sesama saudara, putera Ibu Pertiwi kita Indonesia. Hendaknya kita selalu ingat kepada kesamaan kedudukan kodrat dan kesamaan sifat kodrat kita sekalian. Kita dilahirkan sebagai anak keturunan satu nenek moyang, kita mempunyai kesatuan darah, kita dilahirkan di atas bumi Indonesia, kita mempunyai kesatuan tempat kelahiran dan tempat tinggal. Kita mempunyai kesatuan sumber kehidupan, dimana kita bersama-sama hidup, dimana kita bersama-sama mendapatkan segala sesuatu yang kita perlukan buat kehidupan kita, dimana ia saling bergaul dan kerjasama, dimana kita telah mempunyai nasib dan sejarah bersama, dimana setelah proklamasi kemerdekaan kita mempunyai suatu tekad untuk menyusun suatu hidup bersama dalam negara, yang bersatu, merdeka, adil dan makmur buat kita sendiri dan anak keturunan kita sampai akhir jaman (Muladi, 2006).

C. URGENSI PENDEKATAN MULTIKULTURALISME

Secara etimologis istilah multikulturalisme berasal dari kata multi artinya banyak dan kata kultur artinya budaya serta isme yaitu pandangan/faham atau faham budaya plural dan sebagai lawannya adalah monokulturalisme atau faham budaya tunggal. Pendekatan multikulturalisme dapat diartikan suatu strategi pendekatan yang mengapresiasi keragaman budaya sebagai realitas objektif dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam praktik pendekatan multikulturalisme ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan. (Choirul Machfud, 2005), dan ingin menciptakan budaya masyarakat yang toleran dan inklusif (Iriyanto, 2006).

Wacana pendekatan berwawasan multikulturalisme dimaksudkan untuk mengatasi masalah ketahanan nasional dengan merespon dampak perkembangan globalisasi, dan fenomena konflik etnis, sosial budaya, yang muncul di kalangan masyarakat Indonesia yang berwajah multikultural. Kerawanan konflik sebagai bagian permasalahan ketahanan nasional ini sewaktu – waktu bisa timbul akibat suhu politik, agama, sosio budaya yang memanas. Penyebab konflik sangat kompleks namun sering disebabkan karena perbedaan etnis, agama, ras. Kasus perbedaan SARA yang pernah terjadi di tanah air belum lama ini misalnya konflik Ambon, Poso, dan konflik etnis Dayak dengan suku Madura di Sampit. Banyak lagi kasus semacam yang belum kita ketahui atau belum terpublikasi media masa.

D. POLA PENDEKATAN MULTIKULTURALISME DALAM MENGATASI PROBLEM KETAHANAN NASIONAL

Pengalaman kejadian itu menjadi catatan bagi kita semua terutama bagi kalangan pendidikan untuk mengkaji dan mencari jalan pemecahannya. Praktik pendekatan multikulturalisme, melalui peran pendidikan disini setidaknya memberikan penyadaran (*consciousness*) kepada masyarakat bahwa pemecahan masalah melalui konflik bukan suatu cara yang baik dan tidak perlu dibudayakan. Untuk itu pendidikan formal harus mampu memberikan tawaran-tawaran pembelajaran yang mencerdaskan, misalnya mendisain materi, metode, kurikulum yang mampu menyadarkan masyarakat atau peserta didik akan pentingnya sikap toleran, menghormati perbedaan suku, ras, agama dan budaya. Pendidikan yang kini dibutuhkan bangsa Indonesia yang multikultural adalah pendidikan yang memberikan peran sebagai media transformasi budaya (*transformation of culture*) di samping transformasi pengetahuan (*transformation of knowledge*). Selama ini pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada perannya sebagai media transformasi pengetahuan.

Paradigma baru yang harus dikembangkan di dunia pendidikan saat ini adalah paradigma pendidikan yang mampu menempatkan pendidikan sebagai media transformasi budaya disampaing sebagai media transformasi pengetahuan (Hamdan Mansur, 2004). Alternatif yang ditawarkan adalah pendidikan berwawasan multikulturalisme. Paradigma pendidikan berwawasan multikulturalisme tersebut bermuara pada terciptanya sikap peserta didik yang mau menghargai, menghormati perbedaan etnis, agama dan budaya dalam masyarakat. Kemudian juga, pendidikan multikultural memberi penyadaran pada peserta didik bahwa perbedaan suku, agama dan budaya serta lainnya tidak menjadi penghalang bagi peserta didik untuk bersatu dan bekerjasama. Dengan perbedaan yang bermuatan solidaritas nasional (*national solidarity*) justeru menjadi pendorong untuk berlomba dalam kebaikan bagi kehidupan bersama. Pengalaman lalu pada masa sentralisme kekuasaan pemerintah Orde Baru tidak perlu terulang kembali, dengan pemaksaan *monokulturalisme* yang nyaris seragam telah memunculkan reaksi balik masyarakat. Langkah kebijakan ini bukan tanpa membawa implikasi negatif terhadap upaya rekonstruksi kebudayaan nasional yang multikultural.

Di Indonesia pendidikan berwawasan multikulturalisme tergolong masih baru, namun jika dipandang sebagai sebuah pendekatan maka pendidikan berwawasan multikultural sangat sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogin, terlebih pada masa pelaksanaan otonomi dan desentralisasi yang sudah dimulai sejak tahun 1999/2000, dan hingga saat ini pelaksanaannya belum mencapai harapan semua pihak. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara langsung atau pun tidak memberi dampak bagi dunia pendidikan untuk menciptakan otonomi pendidikan. Dengan demikian pendidikan multikultural yang ditawarkan ini sejalan dengan pengembangan demokrasi yang berjalan seiring dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Perlu difahami, jika kebijakan otonomi daerah

tidak dilaksanakan dengan hati – hati, kebijakan ini justru akan menggiring kita ke arah jurang perpecahan bangsa atau disintegrasi bangsa. Monokulturalisme di dunia pendidikan kita masih nampak sekali jika ditilik dari beberapa segi pendidikan. Misalnya, mulai dari kurikulum, materi pelajaran, hingga metode pengajaran di kelas sama. Lengkap dengan penyelenggaraan pendidikan yang etatisme dan diperkuat dengan sistem birokrasi yang ketat. Semua peraturan perundang-undangan dan keputusan yang dibuat pusat berlaku untuk semua daerah.

Memberlakukan pendidikan berwawasan multikulturalisme membawa konsekuensi perubahan paradigma manajemen dan kurikulum pendidikan. Masalah manajemen pendidikan di sini adalah bagaimana mengubah orientasi; (a) dari penyelenggaraan pendidikan dengan dominasi kekuasaan birokrasi menjadi dominasi kekuasaan akademi; (b) dari orientasi untuk kepentingan orang dewasa ke kepentingan anak didik; (c) dari pendekatan seragam ke pendekatan beragam (multikultural), demokrasi terbuka; (d) dari serba pusat ke distribusi daerah; (e) dari kecenderungan berorientasi global beralih ke orientasi kepentingan nasional dan regional. Sedangkan masalah kurikulum adalah bagaimana menyusun institusional curriculum di semua jenjang pendidikan dapat mengadopsi nilai-nilai pluralitas kedaerahan.

Pendidikan berwawasan multikulturalisme ini dinilai penting utamanya dalam memupuk rasa kebersamaan dalam keberagaman untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan semangat kemerdekaan tahun 1945. Sejak awal para pendiri negara kita (the Founding Fathers) telah menyadari akan keragaman bahasa, budaya, agama, dan suku bangsa kita. Bangsa Indonesia adalah multikultural, sehingga menganut semangat Bhineka Tunggal Ika (*unity in diversity*) untuk mewujudkan persatuan yang diinginkan rakyat kebanyakan, dan mediasinya adalah "toleransi"

Untuk itu ideologi Pancasila sangat dibutuhkan, apalagi dengan mempertimbangkan postur Indonesia berupa negara kepulauan, pluralistik dan berada pada posisi silang dunia. Ideologi Pancasila di sini menempati posisi sebagai Value Devence dalam kerangka Main Security Policy untuk menghadapi bahaya dari luar berupa kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan politik. Bahkan dalam menentukan kebijakan keamanan regional, dan bahaya dari dalam berupa konsolidasi demokrasi, keadilan sosial yang harus dicapai, kejahatan, kekerasan dan ketidakstabilan politik.

The Founding Fathers telah menjadikan Pancasila tidak sekuler, karena pada saat dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yang penuh nuansa penjajahan, justru bukan menempatkan HAM (Kemanusiaan yang adil dan beradab) sebagai sila pertama, tetapi sila Ketuhanan YME sebagai refleksi sifat religius bangsa Indonesia yang tidak hanya menghormati religi sebagai kepentingan hukum, tetapi juga rasa keagamaan serta ketenteraman hidup beragama.

Ideologi Pancasila ditempatkan sebagai Margin of Appreciation atau juga bisa dijadikan sebagai pembenaran terhadap pemikiran Constructive Pluralism yang di satu fihak tidak dapat menyetujui gerakan atas dasar Right to Self Determination, tetapi juga menentang praktik minority by force dan minority by will (Muladi, 2006).

Margin of Appreciation sebagai penyeimbang dan penyelaras bahkan pembenaran berlakunya nilai-nilai nasional dalam kerangka nilai-nilai universal. Pembenaran dan pengakuan tidak hanya berasal dari satu sisi saja (nasional) tetapi juga dari sisi internasional. Prosesnya bila perlu melalui proses yuridis baik nasional maupun internasional.

E. PENUTUP

1. Pendekatan multikulturalisme harus difahami sebagai strategi kebudayaan dalam mengatasi problem ketahanan nasional Indonesia saat ini.
2. Ketahanan nasional Indonesia sebagai kekuatan inti bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia tergantung dari kemampuan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) untuk menghadapi arus perubahan nilai-nilai global.
3. Pengembangan wawasan multikulturalisme ke-Indonesiaan secara imperatif mempersyaratkan Pancasila sebagai basis dan perekat kohesifitas dalam pluralitas budaya .
4. Pendekatan multikulturalisme menempatkan pendidikan pada posisi peran ganda, yaitu:
 - a. Membangun masyarakat bangsa Indonesia yang cerdas dan berkarakter.
 - b. Mengemban misi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik
 - c. Memperkuat akar budaya dalam pengembangann kepribadian dan ilmu pengetahuannya
 - d. Meletakkan nilai kultural sebagai pondasi pengembangan kurikulum nasional dan lokal.
 - e. Membentuk pribadi masyarakat Indonesia yang cinta damai dengan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam keberagaman.

Kaelan, MS. (2006). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM.

Muladi. (2006). *Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan*, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Choirul Machfud. (2005). *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamdan Mansur. (2004). *Pembinaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian*, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Iriyanto Widisuseno. (2006). "Pengembangan MPK dalam Perspektif Filosofis". Makalah SIMNAS MPK IV, UNS Surakarta.

